



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 2, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/03/2025  
 Reviewed : 02/04/2025  
 Accepted : 04/04/2025  
 Published : 11/04/2025

Isvan Taufik<sup>1</sup>  
 M. Zaenal Ramdhani  
 As Siddiq<sup>2</sup>  
 Budi Heri Pirngadi<sup>3</sup>

## PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS BIDANG KECIPTAKARYAAN PROVINSI BANTEN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

### Abstrak

Dalam melaksanakan kepentingan/kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas pembangunan wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menentukan Program-program yang dikelola menggunakan dana APBD. Salah satu permasalahan pengelolaan APBD Provinsi Banten adalah bagaimana menentukan prioritas program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan adanya fenomena tersebut perlu penentuan prioritas program dengan pendekatan berbasis sistem analisis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang program prioritas berbasis sistem agar terciptanya sistem yang mendukung pengambilan keputusan sesuai dengan urgensi dan kebutuhan pengembangan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kemudahan untuk para pengambil keputusan dalam mengambil program mana yang sesuai dengan kebutuhan dan program mana yang prioritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Analytical Hierarchy Process*. Hasil penelitian dari analisis AHP, Jumlah program sektor keciptakarya untuk air minum, limbah, persampahan, permukiman, bangunan gedung serta bangunan lingkungan berdasarkan inventarisasi dan sintesa adalah sebesar 213 program. Program kegiatan dan prioritas dengan jumlah terbanyak adalah prioritas 3 dengan jumlah 102 program, prioritas 2 dengan jumlah 94 dan hanya sebanyak 17 program yang dianggap perlu diprioritaskan/prioritas 1 hasil perhitungan total program. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa aspek perencanaan dan aspek status kesiapan lahan merupakan kategori prioritas utama.

**Kata Kunci:** Program, Prioritas, Cipta Karya, Analytical Hierarchy Process.

### Abstract

In carrying out the interests / needs of the community in order to improve the quality of regional development, the Banten Province Public Works and Spatial Planning Office determines programs that are managed using APBD funds. One of the problems of managing the Banten Province APBD is how to determine the priority of work programs to be implemented. With this phenomenon, it is necessary to determine program priorities with a system analysis-based approach. This study aims to design a system-based priority program in order to create a system that supports decision making according to the urgency and needs of development. So that this research is expected to provide convenience benefits for decision makers in taking which programs are in accordance with the needs and which programs are priorities. This research uses a quantitative approach with the Analytical Hierarchy Process method. The results of the AHP analysis showed that the number of programs in the keciptakarya sector for drinking water, waste, solid waste, settlements, buildings and environmental buildings based on inventory and synthesis was 213 programs. The program activities and priorities with the highest number are priority 3 with 102 programs, priority 2 with 94 and only 17 programs are considered to be prioritized/priority 1 as a result of the total program calculation. This study found that the planning aspect and the land readiness status aspect are the top priority categories.

**Keywords:** Program, Priority, Human Settlements, Analytical Hierarchy Process.

<sup>1</sup> Dinas PUPR Provinsi Banten

<sup>2</sup> Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung

<sup>3</sup> Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan  
 email: isvantaufik@bantenprov.go.id<sup>1</sup>, 20070322103@unisba.ac.id<sup>2</sup>, budiheripirngadi@unpas.ac.id<sup>3</sup>

## PENDAHULUAN

Untuk mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Banten, setiap instansi pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berjalan berkesinambungan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 2017). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten merupakan instansi yang menjalankan fungsi pemenuhan bidang keciptakaryaan di Provinsi Banten (Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, 2016). Dalam pelaksanaannya bidang keciptakaryaan terbagi kedalam seksi SPAM, Persampahan dan air limbah dan seksi penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Bangunan dan Lingkungan (Peraturan Gubernur Banten No 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah, 2022). Dalam melaksanakan tujuan pembangunan daerah diperlukan program prioritas untuk mengatasi permasalahan berdasarkan urgensi dan kebutuhan pengembangan (Jadiman Parhusip, 2019).

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik (Telenggen et al., 2021), bersifat monumental, lintas urusan, dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat (Napir & Junus, 2019), sehingga pemerintah dalam melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang baik perlu menentukan apa saja program prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat (Simarmata & Sutrisno, 2022).

Penyusunan Program Prioritas bidang Keciaptakaryaan di Provinsi Banten memiliki beberapa latar belakang penting yang terkait dengan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan akses infrastruktur, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, menghadapi tantangan perubahan iklim, mewujudkan integrasi dan sinergi antar sektor, memperkuat konektivitas dan daya saing, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu Provinsi Banten mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap perubahan iklim.

Selama ini penentuan program prioritas bidang Keciaptakaryaan ditentukan melalui rapat eselon pejabat di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk merancang program prioritas berbasis sistem agar terciptanya sistem yang mendukung pengambilan keputusan sesuai dengan urgensi dan kebutuhan pengembangan. Penelitian model ini pernah dilaksanakan pada penelitian sebelumnya (Afandi, 2018; Makkasau, 2012; Ridha, 2018; Azis et. all, 2020), dengan dasar tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kemudahan untuk para pengambil keputusan dalam mengambil program mana yang sesuai dengan kebutuhan dan program mana yang prioritas. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas PUPR Provinsi Banten perlu untuk menyusun Program Prioritas Keciaptakaryaan Berbasis Sistem.

## METODE

Penelitian ini difokuskan menganalisis program-program yang ada pada bidang cipta karya Dinas PUPR Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dengan metode AHP. Metode AHP memiliki beberapa kelebihan dalam penyelesaian masalah secara struktural dan hirarkis serta dapat menghitung validitas hingga batas toleransi inkonsistensi sebagai dasar pengambilan keputusan (Munthafa et al., 2018). AHP juga merupakan model yang memberikan gambaran terkait dengan model keputusan untuk orang-orang yang memahami permasalahan kooperatif (Hermawati, 2020).

Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia (Cahyana, 2010). Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki (Yuli Astuti, M. Suyanto, 2011).

Untuk mengukur variabel kuesioner diberikan kepada pegawai dan pejabat eselon yang ada di bidang cipta karya dan pejabat struktural DPUPR Provinsi Banten. Data yang dianalisis merupakan data rencana program yang sudah di susun berdasarkan dokumen perencanaan

daerah. Dokumen perencanaan daerah tersebut diintegrasikan berdasarkan program bidang keciptakaryaan sesuai dengan kedalaman kebijakan & program. Berikut kedalaman kebijakan program dari masing-masing dokumen perencanaan daerah yang di analisis. Program Bidang Keciaptakaryaan di inventarisasi pada dokumen perencanaan daerah diantaranya:

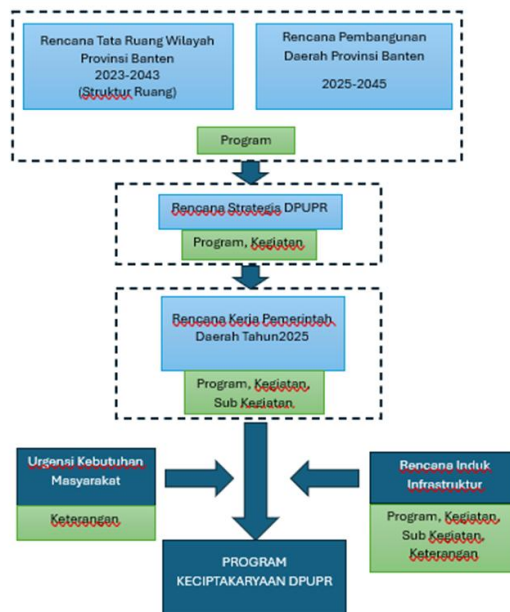
1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025
3. Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026
4. Rencana Strategis Perubahan Dinas PUPR Tahun 2023 – 2026
5. Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045
6. Dokumen Rencana Induk Pada Masing-Masing Bidang
7. Analisis Kebutuhan & Urgensi Program yang berdampak langsung kepada masyarakat

Dokumen perencanaan daerah tersebut diintegrasikan berdasarkan bidang program keciptakaryaan sesuai dengan kedalaman kebijakan & program. Berikut kedalaman kebijakan program dari masing-masing dokumen perencanaan daerah yang di analisis.

Tabel 1. Analisis Kedalaman Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Keterangan Kegiatan pada dokumen perencanaan daerah di Provinsi Banten

No	Dokumen Perencanaan Daerah	Kedalaman Program				
		Sektor	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
1	RTRW Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043					
2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025					
3	RPD Provinsi Banten 2023-2026					
4	Rencana Strategis Perubahan Dinas PUPR Tahun 2023 – 2026					
5	RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045					
6	Dokumen Rencana Induk Pada Masing-Masing Seksi					

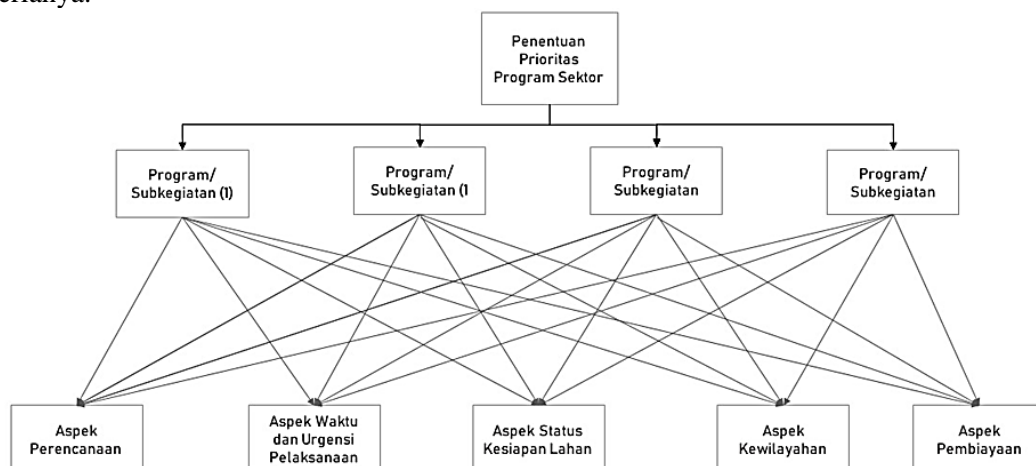
Hasil inventarisasi program keciptakaryaan Dinas PUPR Provinsi Banten kemudian di kodifikasi dan diterjemahkan kedalam keterangan sub kegiatan (Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 Tentang Perbubahan Atas Keputusan Permendagri No. 500-5889 Tahun 221 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, 2023). Keterangan sub kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan analisis program keciptakaryaan Dinas PUPR Provinsi Banten. Secara skema inventarisasi program keciptakaryaan terdapat dalam skema pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Proses Inventarisasi Program Keciaptakarya PUPR Provinsi Banten

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan multikriteria dalam penelitian ini disederhanakan dalam bentuk hierarki yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan, kriteria penilaian dan alternatif pilihan. Persoalan yang akan diselesaikan diuraikan menjadi unsur utama yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki penentuan prioritas program yang berisi alternatif-alternatif yang akan dibandingkan satu sama lain dengan kriterianya.



Gambar 2. Struktur Hierarki Penentuan Prioritas Program Keciaptakarya

Berdasarkan hasil inventarisasi dan sintesa program AHP, terdapat 6 sektor program keciptakarya dengan jumlah total kriteria (program kegiatan) sebanyak 213 Kriteria (program kegiatan) serta jumlah alternatif (variabel penilaian) sebesar 5 aspek yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek waktu dan urgensi pelaksanaan, aspek status kesiapan lahan, aspek kewilayahan, dan aspek pembiayaan yang kemudian nantinya akan dinilai kelas prioritas dari masing – masing program kegiatan dan terbagi kedalam 3 kelas yaitu prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3.

### Penilaian Kriteria Dan Alternatif

Dari 5 aspek program kerja ditentukan prioritas kepentingannya, dalam penelitian ini digunakan prinsip AHP perbandingan berpasangan, tingkat kepentingan suatu kriteria terhadap kriteria lain untuk menentukan bobot. Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya. Proses

perbandingan berpasangan, dimulai dari level hierarki paling atas yang ditujukan untuk memilih kriteria.

Setelah bobot kriteria didapatkan selanjutnya dilakukan pengecekan konsistensi untuk matriks perbandingan berpasangannya. Jika lebih dari 0,1 maka harus dilakukan perbandingan berpasangan kembali sampai didapatkan rasio kurang dari atau sama dengan 0,1 (konsisten). Hal yang serupa dilakukan juga terhadap masing-masing matriks perbandingan antar alternatif.

Tabel 2. Ilustrasi Perbandingan Berpasangan dan Bobot Kriteria

	K1	K2	K3	K4	W (Bobot)
K1	1.00	3.00	1.00	0.60	0.25
K2	0.33	1.00	0.33	0.20	0.08
K3	1.00	3.00	1.00	0.60	0.25
K4	1.67	5.00	1.67	1.00	0.42

### Penilaian Prioritas Subkriteria

Analisis penentuan prioritas dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan bobot kepentingan pada masing – masing variabel penilaian (Silsilani et. al, 2024), nantinya hasil dari matriks sanding variabel penilaian digunakan untuk menilai setiap kriteria/program kegiatan, sehingga menghasilkan prioritas program untuk dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten berdasarkan penilaian yang bersumber dari *Expert Choice*. Metode ini menggunakan AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Penentuan prioritas program keciptakarya menggunakan AHP berdasarkan variabel berikut:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Waktu & Urgensi Pelaksanaan;
- Aspek Status Kesiapan Lahan;
- Aspek Kewilayahan;
- Aspek Pembiayaan.

Variabel tersebut kemudian diberi penilaian oleh aplikasi *expert choice* yang didasari nilai skala dasar serta indikator dari Permen ATR No 13 Tahun 2021 tentang KKPR dan SPPR dan rancangan Permen ATR Tahun 2024 tentang Pelaksanaan SPPR. Berikut adalah hasil penilaian matriks berpasangan variabel penilaian.

Penentuan tingkat kepentingan matriks berpasangan didasarkan pada Permen ATR No 13 Tahun 2021 tentang KKPR dan SPPR dan rancangan Permen ATR Tahun 2024 tentang Pelaksanaan SPPR. Dengan bobot penilaian Aspek Perencanaan (20%), Aspek Waktu & Urgensi Pelaksanaan (30%), Aspek Status Kesiapan Lahan (20%), Aspek Kewilayahan (10%) dan Aspek Pembiayaan 20%. Berikut adalah hasil penilaian matriks berpasangan variabel penilaian (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, 2021).

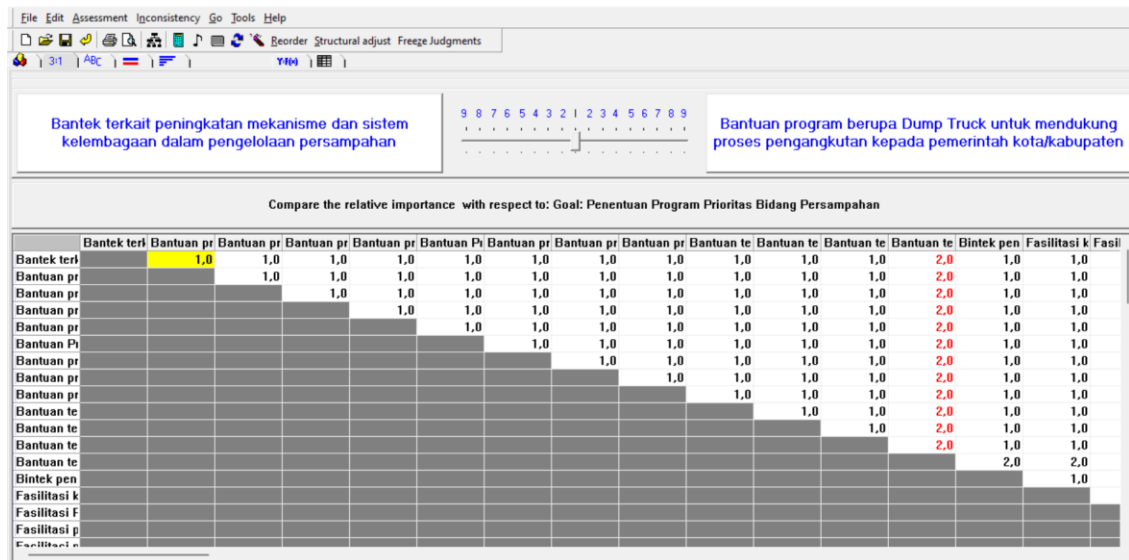
	Kewilayah:	Pelaksana:	Pembiaya:	Perencana	Status Lah
Kewilayahan (L: 1,000)		3,0	2,0	2,0	2,0
Pelaksanaan			2,0	2,0	2,0
Pembiayaan				1,0	1,0
Perencanaan					1,0
Status Lahan	Incon: 0,00				

Gambar 3. Matriks Berpasangan Variabel Penilaian

### Hasil Penilaian Program Keciaptakarya

#### 1. Sektor Persampahan

Hasil dari penilaian program berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan tersebut kemudian dituangkan kedalam matriks sanding program bidang persampahan yang dapat dilihat pada lampiran. Adapun proses dalam aplikasi *expert choice* adalah sebagai berikut.



Gambar 5. Matriks Sanding Bidang Limbah dalam Expert Choise

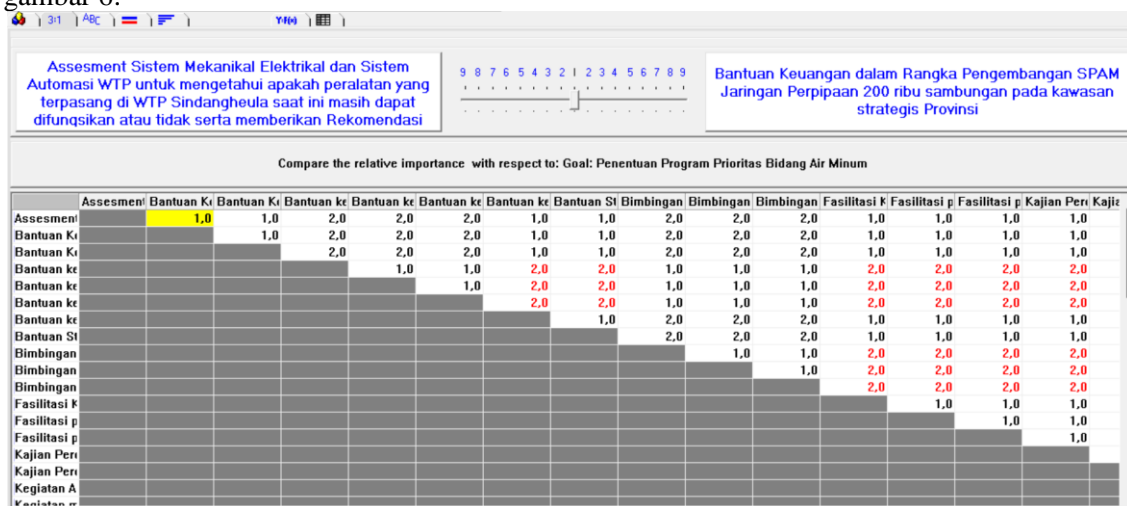
Tabel 4. Hasil Penentuan Skala Prioritas Bidang Limbah

Skala Prioritas Program	Jumlah Program Kegiatan
Prioritas 1	-
Prioritas 2	8
Prioritas 3	7
Total	15

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah program bidang limbah secara keseluruhan adalah 15 program kegiatan. Prioritas 2 memiliki jumlah program terbanyak yaitu 8 program, sedangkan prioritas 3 sebanyak 7 program.

### 3. Sektor Air Minum

Hasil dari penilaian program berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan tersebut kemudian dituangkan kedalam matriks sanding program bidang air bersih yang dapat dilihat pada lampiran. Adapun proses dalam aplikasi *expert choise* adalah seperti disajikan pada gambar 6.



Gambar 6. Matriks Sanding Bidang Air Bersih dalam Expert Choise

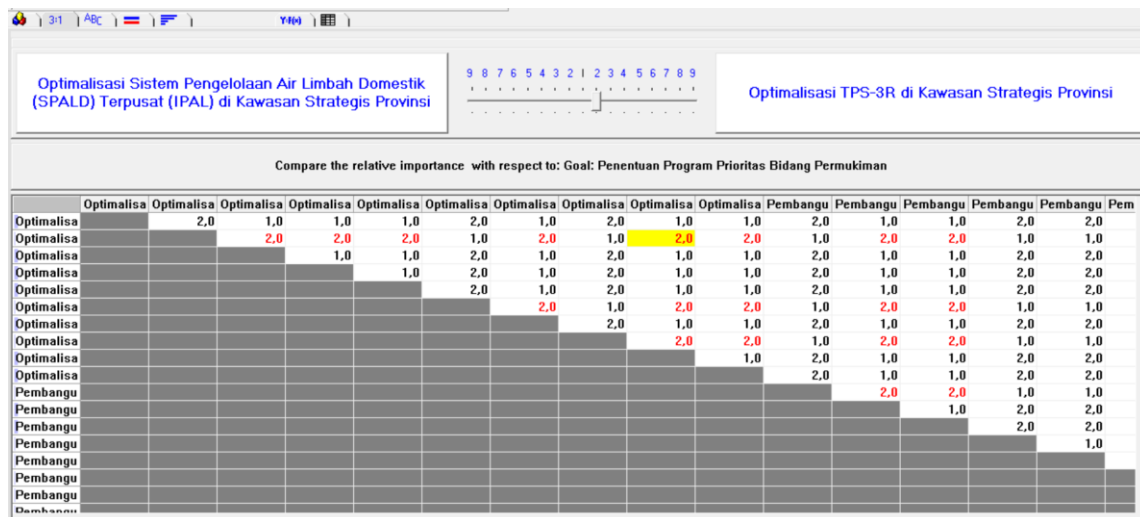
Tabel 5 Hasil Penentuan Skala Prioritas Bidang Air Bersih

Skala Prioritas Program	Jumlah Program Kegiatan
Prioritas 1	4
Prioritas 2	24
Prioritas 3	27
Total	55

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah program bidang air bersih secara keseluruhan adalah 55 program kegiatan. Prioritas 3 memiliki jumlah program terbanyak yaitu 27 program, sedangkan prioritas 2 sebanyak 24 program, dan hanya 4 program yang termasuk kedalam prioritas 1. Program yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisis adalah program pembangunan SPAM BJP untuk MBR, pekerjaan rehab penataan jaringan listrik pada bangunan WTP Sindangheula dan perbaikan panel listrik, rehabilitasi intake dan pipa transmisi air baku SPAM Sindangheula dan pekerjaan Pemeliharaan Perangkat Mekanikal dan Elektrikal WTPP SPAM Sindangheula.

### 4. Permukiman

Hasil dari penilaian program berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan tersebut kemudian dituangkan kedalam matriks sanding program bidang permukiman yang dapat dilihat pada lampiran. Adapun proses dalam aplikasi *expert choise* adalah seperti disajikan pada gambar 7.



Gambar 7. Matriks Sanding Bidang Permukiman dalam Expert Choise

Tabel 6. Hasil Penentuan Skala Prioritas Bidang Permukiman

Skala Prioritas Program	Jumlah Program Kegiatan
Prioritas 1	9
Prioritas 2	23
Prioritas 3	1
Total	33

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah program bidang permukiman secara keseluruhan adalah 33 program kegiatan. Prioritas 2 memiliki jumlah program terbanyak yaitu 23 program, sedangkan prioritas 3 sebanyak 1 program, dan terdapat 9 program yang termasuk kedalam prioritas 1. Program yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisis adalah program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan strategis provinsi, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di kawasan strategis provinsi, optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di kawasan strategis provinsi, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di kawasan strategis provinsi, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan strategis provinsi, optimalisasi TPS-3R di kawasan strategis provinsi, Optimalisasi TPST di kawasan strategis provinsi, optimalisasi SPA di kawasan strategis provinsi dan optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD) di Kawasan Strategis Provinsi.

#### 5. Sektor Bangunan Gedung

Hasil dari penilaian program berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan tersebut kemudian dituangkan kedalam matriks sanding program bidang bangunan gedung yang dapat dilihat pada lampiran. Adapun proses dalam aplikasi *expert choise* adalah seperti disajikan pada gambar 8.

	Identifikasi Pelaksana: Pembangu	Pemberian	Pembinaan	Pembinaan	Pembinaan	Pembinaan	Pembinaan	Pembinaan	Pembinaan	Pembinaan	Pembinaan
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran			1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pem				1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung					1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pen						1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pen							1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangun								1,0	2,0	2,0	2,0
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung N									1,0	2,0	2,0
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strate										1,0	2,0
Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek											1,0

Gambar 8 Matriks Sanding Bidang Bangunan Gedung dalam Expert Choise

Tabel 7. Hasil Penentuan Skala Prioritas Bidang Bangunan Gedung

Skala Prioritas Program	Jumlah Program Kegiatan
Prioritas 1	-
Prioritas 2	5
Prioritas 3	6
Total	11

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah program bidang bangunan gedung secara keseluruhan adalah 11 program kegiatan. Prioritas 3 memiliki jumlah program terbanyak yaitu 6 program, sedangkan prioritas 2 sebanyak 5 program.

#### 6. Sektor PBL

Hasil dari penilaian program berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan tersebut kemudian dituangkan kedalam matriks sanding program bidang bangunan dan lingkungannya yang dapat dilihat pada lampiran. Adapun proses dalam aplikasi *expert choise* adalah sebagai berikut.

	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lint	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			1,0	2,0	2,0	2,0
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1,0	2,0	2,0
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lint					1,0	2,0
Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						1,0

Gambar 9. Matriks Sanding Bidang Bangunan dan Lingkungannya dalam Expert Choise

Tabel 8. Hasil Penentuan Skala Prioritas Bidang Bangunan Gedung

Skala Prioritas Program	Jumlah Program Kegiatan
Prioritas 1	-
Prioritas 2	6
Prioritas 3	-
Total	6

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah program bidang bangunan dan lingkungan secara keseluruhan adalah 6 program kegiatan dan seluruh program tersebut termasuk kedalam prioritas 2.

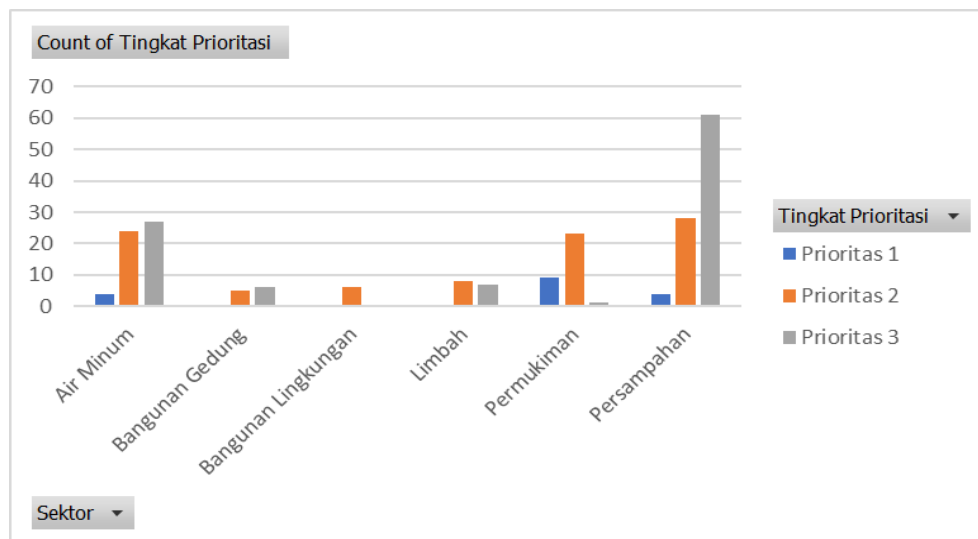
#### Hasil Penilaian Menyeluruh Program Keciptakarya

Secara keseluruhan dari hasil analisis penentuan prioritas pada masing – masing bidang, menunjukkan bahwa program keciptakarya di Provinsi Banten cenderung berada pada prioritas 3 dan 2, hanya terdapat beberapa program saja yang dianggap perlu diprioritaskan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi Penentuan Prioritas Program Keciptakarya

Sektor/Bidang	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Grand Total
Air Minum	4	24	27	55
Bangunan Gedung		5	6	11
Bangunan Lingkungan		6		6
Limbah		8	7	15
Permukiman	9	23	1	33
Persampahan	4	28	61	93
<b>Grand Total</b>	<b>17</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>213</b>

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, Tahun 2024



Gambar 10. Rekapitulasi Penentuan Prioritas Program Keciptakarya

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian prioritas program keciptakarya diketahui bahwa jumlah program secara keseluruhan adalah 213 program kegiatan dan prioritas dengan jumlah terbanyak adalah prioritas 3 dengan jumlah 102 program, prioritas 2 dengan jumlah 94 dan hanya sebanyak 17 program yang dianggap perlu diprioritaskan/prioritas 1.

#### SIMPULAN

Dalam melaksanakan kepentingan/kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas pembangunan wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menentukan Program-programu yang dikelola menggunakan dana APBD. Salah satu permasalahan pengelolaan APBD Provinsi Banten adalah bagaimana menentukan prioritas program kerja yang akan dilaksanakan. Sistem penunjang keputusan dengan metode AHP dapat menjadi solusi untuk permasalahan penentuan prioritas program yang dihadapi. dengan adanya sistem yang terstruktur,

Penentuan prioritas program dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menimbulkan permasalahan keuangan. Metode AHP digunakan sebagai alat untuk menghitung nilai bobot alternatif program. Berdasarkan hasil analisis AHP, Jumlah program sektor

keciptakaryaannya untuk air minum, limbah, persampahan, permukiman, bangunan gedung serta bangunan lingkungan berdasarkan inventarisasi dan sintesa adalah sebesar 213 program, hasil perhitungan total program, dihasilkan bahwa aspek perencanaan dan aspek status kesiapan lahan merupakan kategori prioritas utama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2018). Penerapan Ahp (Analytical Hierarchy Process) Terhadap Pemilihan Supplier Di Ud. Nagawangi Alam Sejahtera Malang. *Jurnal Valtech*, 1(1), 119–124.
- Azis, S., Putranto, E. H. D., & Pratanto, R. (2020). Analisa Skala Prioritas Dengan AHP Untuk Pengalokasian Dana Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Blitar. *Jurnal Info Manajemen Proyek*, 7(8), 37–50. <https://doi.org/10.36040/infomanpro.v7i2.1028>
- Cahyana, N. H. (2010). Teknik Permodelan Analitical Hierarchy Proses (Ahp) Sebagai Pendukung Keputusan. *Telematika*, 6(2), 49–58. <https://doi.org/10.31315/telematika.v6i2.1419>
- Fitria Trisna Sisiliani, Indah Apriliana Sari Wulandari, Tedjo Sukmono, I. M. (2024). Analisis Efektivitas Batching Plant Menggunakan Overall Equipment Effectiveness Dan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Teknik Industri*, 10(2), 237–248.
- Hermawati, A. (2020). Identify strategies for cooperatives in East Java with analytic hierarchical process. *International Journal of Development Issues*, 19(1), 103–117. <https://doi.org/10.1108/IJDI-10-2019-0183>
- Jadianan Parhusip. (2019). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Teknologi Informasi Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 13(2), 18–29. <https://doi.org/10.47111/jti.v13i2.251>
- Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Permendagri No. 500-5889 Tahun 221 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan, Pub. L. No. No. 900.1.15.5-1317, 11 Keuda Kemendagri 1 (2023).
- Makkasau, K. (2012). Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) Dalam Penentuan Prioritas Program Kesehatan (Studi Kasus Program Promosi Kesehatan). *J@TI Undip*, VII(2), 105–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.12777/jati.7.2.105-112>
- Munthafa, A. E., Mubarak, H., Teknik, J., & Universitas, I. (2018). PENERAPAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DALAM SISTEM Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process , Consistency Index , Mahasiswa Berprestasi . Keywords: Analytical Hierarchy Process , Consistency Index , Achievement Student b . Kelebihan dan Kelemaha. *Jurnal Siliwangi*, 3(2), 192–201.
- Napir, S., & Junus, D. (2019). Penguatan Program Prioritas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.15>
- Peraturan Gubernur Banten No 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (2022).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Jdih Bpk Ri Database Peraturan 1 (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (2017).
- Perda Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, 4 2016 (2016).
- Ridha, M. R. (2018). Model Analytical Hierarchy Process Untuk Penilaian Desa Dalam Program Desa Maju Inhil Jaya. *Sistemasi*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v6i1.21>
- Simarmata, N. Y., & Sutrisno, E. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Capaian EPPD (Evaluasi Peyelegaraan Pemerintah Derah) Kota Bekasi pada lima tahun Tentunyaantisipasi yang dilakukan Kecamatan Rawa. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*,

4(2), 37–48.

Telenggen, D. W., Aedah, N., & Tebay, V. (2021). Implementasi Program Prioritas Dalam Pengelolaan Administrasi Kampung di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya (Studi Implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa). *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 83–92. <https://doi.org/10.31957/jkp.v3i2.1554>

Yuli Astuti, M. Suyanto, K. (2011). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Program Studi Perguruan Tinggi. *JURNAL DASI*, 12(1), 56–62. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v3i3.1235>